



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE-**30** /PJ/2017

TENTANG

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 JANUARI 2002

A. Umum

Sehubungan dengan telah selesainya prosedur ratifikasi dan prosedur pemberitahuan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda atas Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 29 Januari 2002 (selanjutnya disebut Persetujuan) yang telah ditandatangani di Jakarta pada 30 Juli 2015, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pemberitahuan saat berlaku dan berlaku efektifnya Persetujuan dimaksud.

B. Maksud...

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberitahukan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai saat berlaku dan berlaku efektifnya Persetujuan.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Persetujuan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi :

1. proses ratifikasi Persetujuan;
2. proses pemberitahuan mengenai telah selesainya prosedur internal masing-masing pihak dalam rangka pemberlakuan Persetujuan;
3. saat berlaku dan berlaku efektifnya Persetujuan; dan
4. pokok - pokok perubahan dalam Persetujuan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 29 Januari 2002 (*Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Its Protocol, Signed at Jakarta on January 29, 2002*).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 29 Januari 2002 (*Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance*

of...

of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, and Its Protocol, Signed at Jakarta on January 29, 2002) tanggal 9 Maret 2017.

E. Materi

1. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (selanjutnya disebut P3B Indonesia-Belanda) telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2002.
2. P3B Indonesia-Belanda telah diamandemen melalui Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 29 Januari 2002 (*Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, and Its Protocol, Signed at Jakarta on January 29, 2002*) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2015.
3. Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Kedutaan Besar Kerajaan Belanda memberitahukan Pemerintah Republik Indonesia bahwa Pemerintah Kerajaan Belanda telah memenuhi persyaratannya dalam rangka pemberlakuan Persetujuan pada tanggal 20 Juni 2016.
4. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 29 Januari 2002 (*Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, and Its Protocol, Signed at Jakarta on January 29, 2002*) pada tanggal 6 Maret 2017 dan telah mengirimkan pemberitahuan selesainya prosedur internal yang diperlukan dalam rangka pemberlakuan Persetujuan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda melalui nota diplomatik tanggal 14 Juni 2017.

5. Berdasarkan...

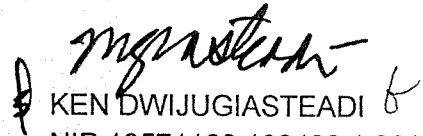


5. Berdasarkan Pasal 10 Persetujuan, ditentukan bahwa:
 - a. Persetujuan mulai berlaku pada hari pertama dari bulan kedua setelah tanggal saat masing-masing Pemerintah telah memberitahu satu sama lain secara tertulis melalui saluran diplomatik (dalam hal ini tanggal 1 Agustus 2017); dan
 - b. ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan akan berlaku untuk pertama kalinya terhadap jumlah yang dibayarkan atau dikreditkan pada saat atau setelah hari pertama dari bulan kedua berikutnya setelah tanggal saat Protokol ini berlaku efektif (dalam hal ini pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2017).
6. Pokok - pokok perubahan dalam Persetujuan antara lain sebagai berikut:
 - a. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2, penghasilan berupa dividen dapat juga dikenai pajak di Negara di mana perusahaan pembayar dividen menjadi penduduknya dengan tarif pajak sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, tetapi jika pemilik manfaat sebenarnya dari dividen tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi:
 - 1) 5 persen dari jumlah bruto dividen jika pemilik manfaat sebenarnya dari dividen adalah suatu perusahaan (selain persekutuan) yang memiliki secara langsung sedikitnya 25 persen dari modal perusahaan pembayar dividen;
 - 2) 10 persen dari jumlah bruto dividen jika pemilik manfaat sebenarnya dari dividen adalah dana pensiun yang diakui dan diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku di salah satu Negara dan yang penghasilannya secara umum dikecualikan dari pajak di Negara yang menurut ketentuan hukumnya dana pensiun tersebut diakui dan diatur;
 - 3) 15 persen dari jumlah bruto dividen untuk jenis dividen lainnya;
 - b. berdasarkan Pasal 11 ayat 4, penghasilan berupa bunga yang timbul di salah satu Negara dapat juga dikenai pajak di Negara di mana bunga tersebut timbul dan menurut perundang-undangan Negara tersebut, tetapi jika pemilik manfaat sebenarnya dari bunga tersebut adalah penduduk dari Negara lainnya dan jika bunga dibayar atas pinjaman yang diberikan untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun atau dibayar sehubungan dengan penjualan peralatan industri, komersial atau ilmiah secara kredit, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 5 persen dari jumlah bruto bunga;

- c. penggantian Pasal 28 tentang Pertukaran Informasi;
- d. penyisipan Pasal 28A tentang Bantuan dalam Penagihan Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **27 Oktober 2017**
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,




KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 19571108 198408 1 001



REPUBLIK INDONESIA

PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA

UNTUK

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN
PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL
29 JANUARI 2002

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN
BELANDA,

BERKEINGINAN untuk menyepakati Protokol untuk mengubah Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2002 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan").

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 10 ayat 2 diganti menjadi sebagai berikut:

"2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikenai pajak di Negara di mana perusahaan pembayar dividen menjadi penduduknya dengan tarif pajak sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, tetapi jika pemilik manfaat sebenarnya dari dividen tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi:

- a) 5 persen dari jumlah bruto dividen jika pemilik manfaat sebenarnya dari dividen adalah suatu perusahaan (selain persekutuan) yang memiliki secara langsung sedikitnya 25 persen dari modal perusahaan pembayar dividen;
- b) 10 persen dari jumlah bruto dividen jika pemilik manfaat sebenarnya dari dividen adalah dana pensiun yang diakui dan diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku di salah satu Negara dan yang penghasilannya secara umum dikecualikan dari pajak di Negara yang menurut ketentuan hukumnya dana pensiun tersebut diakui dan diatur;
- c) 15 persen dari jumlah bruto dividen untuk jenis dividen lainnya."

Pasal 2

Pasal 11 ayat 4 diganti menjadi sebagai berikut:

"4. Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara dapat juga dikenai pajak di Negara di mana bunga tersebut timbul dan menurut perundang-undangan Negara tersebut, tetapi jika pemilik

manfaat sebenarnya dari bunga tersebut adalah penduduk dari Negara lainnya dan jika bunga dibayar atas pinjaman yang diberikan untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun atau dibayar sehubungan dengan penjualan peralatan industri, komersial atau ilmiah secara kredit, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 5 persen dari jumlah bruto bunga."

Pasal 3

- a) Dalam Pasal 24 ayat 3 dari Persetujuan, kata-kata "Pasal 16 ayat 1" diganti menjadi "Pasal 16 ayat 1 dan 3".
- b) Dalam Pasal 24 ayat 4 dari Persetujuan, kata-kata "Pasal 11 ayat 2" diganti menjadi "Pasal 11 ayat 2 dan 4".

Pasal 4

Pasal 28 diganti seluruhnya dengan Pasal berikut:

"Pasal 28 Pertukaran Informasi

1. Pejabat berwenang dari kedua Negara akan melakukan pertukaran informasi yang dipandang relevan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk pengadministrasian atau penerapan hukum domestik yang berkaitan dengan perpajakan dalam bentuk dan nama apapun yang dikenakan atas nama kedua Negara tersebut, atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya, sepanjang pengaturan perpajakan tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi ini tidak dibatasi oleh Pasal 1 dan Pasal 2.

2. Setiap informasi yang diterima berdasarkan ayat 1 oleh salah satu dari kedua Negara akan dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti informasi yang diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara tersebut dan hanya boleh diungkapkan kepada orang-orang atau pihak-pihak berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan, penegakan hukum atau penuntutan, pengambilan keputusan banding sehubungan pajak-pajak yang merujuk ayat 1, atau lembaga yang mengawasi orang-orang atau pihak-pihak berwenang di atas. Orang-orang atau pihak-pihak berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi dimaksud untuk tujuan-tujuan di atas. Mereka boleh mengungkapkan informasi dimaksud dalam proses pengadilan atau pembuatan keputusan pengadilan.
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat sebelumnya tidak boleh ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara:
 - a) untuk melakukan tindakan-tindakan administrasi yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan atau praktik administrasi yang berlaku di Negara tersebut atau Negara lainnya;
 - b) untuk memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara lainnya;
 - c) untuk memberikan informasi yang akan mengungkapkan rahasia perniagaan, usaha, industri, komersial atau profesi, atau proses dagang, atau informasi yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijakan publik (*ordre public*).
4. Apabila informasi yang diminta oleh salah satu dari kedua Negara berkesesuaian dengan Pasal ini, Negara lainnya akan menggunakan tindakan-tindakan pengumpulan informasi untuk memperoleh informasi yang

diminta tersebut, meskipun Negara lainnya tersebut tidak memerlukan informasi dimaksud untuk kepentingan perpajakannya. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelum ini harus memperhatikan pembatasan-pembatasan dalam ayat 3 namun sama sekali tidak boleh ditafsirkan sebagai mengizinkan suatu Negara untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena tidak memiliki kepentingan domestik atas informasi yang diminta tersebut.

5. Ketentuan-ketentuan pada ayat 3 tidak boleh ditafsirkan sebagai mengizinkan suatu Negara untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena informasi dimaksud dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, wakil atau pihak yang bertindak sebagai agen atau dalam kapasitas sebagai perantara atau karena berkaitan dengan kepemilikan suatu pihak terhadap informasi tersebut.”

Pasal 5

Setelah Pasal 28, disisipkan Pasal berikut ini:

“Pasal 28A

Bantuan dalam Penagihan Pajak

1. Kedua Negara akan saling memberi bantuan satu sama lain dalam penagihan klaim penerimaan pajak. Bantuan ini tidak dibatasi oleh Pasal 1 dan Pasal 2. Pejabat berwenang kedua Negara melalui persetujuan bersama dapat menentukan metode penerapan Pasal ini. Permintaan bantuan tidak dapat dilakukan jika total nilai klaim penerimaan pajak yang ditagih kurang dari 1.500 Euro.

2. Istilah "klaim penerimaan pajak" yang digunakan dalam Pasal ini adalah jumlah utang pajak dalam bentuk dan nama apapun yang dikenakan atas nama Negara, sepanjang pengenaan pajak tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan ini atau instrumen lain di mana kedua Negara merupakan Negara pihak, termasuk juga bunga, sanksi administrasi dan biaya penagihan atau biaya pengamanan terkait jumlah tersebut.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini berlaku hanya terhadap klaim penerimaan pajak yang berbentuk instrumen yang dapat dieksekusi di Negara pemohon dan, kecuali bila disepakati berbeda oleh para pejabat berwenang, yang tidak dipersengketakan. Namun demikian, apabila klaim tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak seseorang/badan yang bukan penduduk Negara pemohon, Pasal ini hanya berlaku, kecuali disepakati berbeda oleh para pejabat berwenang, apabila klaim tersebut tidak lagi dipersengketakan. Klaim penerimaan pajak harus ditagih oleh Negara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Negara lainnya tersebut yang berlaku terhadap penerapan dan penagihan pajak-pajaknya seakan-akan klaim penerimaan pajak dimaksud adalah klaim penerimaan pajak Negara lainnya tersebut.
4. Apabila klaim penerimaan pajak suatu Negara merupakan klaim yang berkenaan dengan kondisi dimana Negara tersebut dapat, berdasarkan undang-undangnya, melakukan tindakan-tindakan pengamanan dengan maksud untuk memastikan penagihannya, klaim penerimaan pajak dimaksud harus, atas permintaan pejabat berwenang Negara tersebut, dipenuhi untuk tujuan pengambilan langkah-langkah pengamanan oleh pejabat berwenang Negara lainnya. Negara lainnya tersebut harus melakukan tindakan-tindakan pengamanan atas klaim penerimaan pajak tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Negara lainnya seakan-akan klaim penerimaan pajak tersebut adalah klaim penerimaan pajak Negara lainnya tersebut meskipun, pada saat tindakan-tindakan

pengamanan tersebut dilakukan, klaim penerimaan pajak tersebut tidak dapat ditagih di Negara yang disebutkan pertama atau terhutang oleh orang/badan yang berhak untuk mencegah upaya penagihannya.

5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 3 dan ayat 4, klaim penerimaan pajak yang dipenuhi oleh suatu Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 tidak boleh, di Negara tersebut, terikat oleh batasan waktu atau pemberian prioritas yang berlaku atas suatu klaim penerimaan pajak berdasarkan perundang-undangan Negara tersebut karena sifatnya yang sedemikian dan, kecuali disepakati berbeda oleh para pejabat berwenang, tidak dapat ditagih dengan memenjarakan debitur. Selain itu, klaim penerimaan pajak yang dipenuhi oleh suatu Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 tidak boleh, di Negara tersebut, mempunyai prioritas yang berlaku atas klaim penerimaan pajak berdasarkan perundang-undangan Negara lainnya tersebut.
6. Catatan-catatan yang berkenaan dengan keberadaan, validitas atau jumlah suatu klaim penerimaan pajak di suatu Negara tidak dapat diajukan ke pengadilan atau badan-badan administrasi Negara lainnya.
7. Dalam hal, kapan pun setelah suatu permintaan telah diajukan oleh suatu Negara berdasarkan ayat 3 atau ayat 4 dan sebelum Negara lainnya telah mengumpulkan dan mengirimkan hasil penagihan klaim penerimaan pajak dimaksud kepada Negara yang disebutkan pertama, klaim penerimaan pajak dimaksud tidak lagi merupakan klaim:
 - a) dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, suatu klaim penerimaan pajak dari Negara yang disebutkan pertama yang dapat ditagih berdasarkan perundang-undangan Negara tersebut dan terutang oleh seseorang atau badan yang, pada saat itu, tidak dapat, berdasarkan

perundang-undangan Negara tersebut, mencegah tindakan penagihannya, atau

b) dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, suatu klaim penerimaan pajak dari Negara yang disebutkan pertama yang berkenaan dengan kondisi dimana Negara tersebut dapat, berdasarkan perundang-undangannya, melakukan tindakan-tindakan pengamanan dengan maksud untuk memastikan penagihannya,

pejabat berwenang Negara yang disebutkan pertama harus segera memberitahukan pejabat berwenang Negara lainnya tentang fakta tersebut dan, berdasarkan pilihan Negara lainnya, Negara yang disebutkan pertama harus menunda atau membatalkan permintaannya.

8. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara:

a) untuk melakukan tindakan-tindakan administrasi yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan praktik administrasi yang berlaku di Negara tersebut atau Negara lainnya;

b) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebijakan publik (*ordre public*);

c) memberikan bantuan jika Negara lainnya belum mengupayakan semua tindakan penagihan atau pengamanan yang memadai, tergantung kasusnya, yang tersedia berdasarkan perundang-undangannya atau praktik administrasinya;

d) menyediakan bantuan dalam kasus-kasus tersebut dimana beban administrasi bagi Negara tersebut secara jelas tidak sebanding dengan manfaat yang akan diterima oleh Negara lainnya."

Pasal 6

Pasal berikut disisipkan sebelum Pasal I Protokol pada Persetujuan.

“Ketentuan Umum

Kecuali disebutkan lain dalam reservasi, observasi atau posisi yang mungkin ada dalam *OECD Model Tax Convention* atau Penjelasannya yang dibuat oleh salah satu Negara, kedua Negara tersebut harus menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini yang identik atau serupa secara substansi dengan ketentuan-ketentuan dalam *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital*, sesuai dengan Penjelasan model tersebut yang ada pada saat penandatanganan Persetujuan ini dan modifikasi Penjelasan terkait yang terbit setelah itu. Khususnya, kedua Negara harus menafsirkan istilah ‘pemilik manfaat sebenarnya’ yang digunakan dalam Persetujuan ini sesuai dengan penafsiran sebagaimana dipublikasikan oleh OECD pada saat penandatanganan Persetujuan ini dan modifikasi Penjelasan terkait yang terbit setelah itu.”

Pasal 7

Pasal berikut disisipkan setelah Pasal X Protokol pada Persetujuan:

“XI Dengan mengacu pada Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 maka berlaku juga untuk informasi yang dipandang relevan untuk melaksanakan peraturan-peraturan terkait penghasilan jika otoritas pajak Belanda bertanggung jawab dalam penerapan dan pemberlakuan peraturan-peraturan terkait penghasilan tersebut. Informasi yang diterima berdasarkan Protokol ini hanya akan digunakan untuk tujuan pengenaan kontribusi, pemberian manfaat atau penentuan sejauh mana kontribusi dan manfaat tersebut didapatkan dari peraturan-peraturan terkait penghasilan.”

Pasal 8

Pasal VIII Protokol pada Persetujuan diubah menjadi:

- "1. Apabila pajak yang telah dikenakan di Negara sumber melebihi jumlah pajak yang seharusnya dikenakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10, 11 dan 12, permohonan pengembalian jumlah kelebihan pembayaran pajak tersebut harus diajukan kepada pejabat berwenang Negara yang memajaki tersebut, dalam jangka waktu tiga tahun setelah berakhirnya tahun kalender dimana pajak tersebut dikenakan.
2. Dipahami bahwa persetujuan bersama tentang tata cara penerapan Pasal 10, 11 dan 12 tidak diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pasal-Pasal tersebut."

Pasal 9

Protokol ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan, dan Protokolnya.

Pasal 10

Masing-masing Negara memberitahukan Negara lainnya tentang penyelesaian prosedur-prosedur yang diperlukan oleh perundang-undangannya untuk memberlakukan Protokol ini. Protokol ini mulai berlaku pada hari pertama dari bulan kedua setelah tanggal saat masing-masing Pemerintah telah memberitahu satu sama lain secara tertulis melalui saluran diplomatik. Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini akan berlaku untuk pertama kalinya

terhadap jumlah yang dibayarkan atau dikreditkan pada saat atau setelah hari pertama dari bulan kedua berikutnya setelah tanggal saat Protokol ini berlaku efektif.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberikan kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2015
dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris, ketiga naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan atas Protokol ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN BELANDA

Signed

Signed

SUAHASIL NAZARA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN
FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

ROB SWARTBOL
DUTA BESAR LUAR BIASA
DAN BERKUASA PENUH



REPUBLIK INDONESIA

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, AND ITS
PROTOCOL, SIGNED AT JAKARTA ON JANUARY 29, 2002

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

DESIRING to conclude a Protocol to amend the Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom
of the Netherlands for the avoidance of double taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to taxes on income, and its Protocol, signed at
Jakarta on January 29, 2002 (hereinafter referred to as "the Agreement").

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Paragraph 2 of Article 10 shall be replaced by the following paragraph:

"2. However, such dividends may also be taxed in the State of which the
company paying the dividends is a resident and according to the laws of

that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;
- b) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a pension fund that is recognized and controlled according to the statutory provisions of one of the two States and the income of which is generally exempt from tax in the State according to whose statutory provisions it is recognized and controlled;
- c) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases."

Article 2

Paragraph 4 of Article 11 shall be replaced by the following paragraph:

"4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one of the two States may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State and if the interest is paid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest."

Article 3

- a) In paragraph 3 of Article 24 of the Agreement, the words "paragraph 1 of Article 16" shall be replaced by the words: "paragraphs 1 and 3 of Article 16";
- b) In paragraph 4 of Article 24 of the Agreement, the words "paragraph 2 of Article 11" shall be replaced by the words: "paragraphs 2 and 4 of Article 11".

Article 4

Article 28 shall be replaced in its entirety by the following Article:

“Article 28

Exchange of information

1. The competent authorities of the two States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the two States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by one of the two States shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of the previous paragraphs be construed so as to impose on either State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other State;
 - b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other State;
 - c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or

information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by one of the two States in accordance with this Article, the other State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit either State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit either State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”.

Article 5

The following Article shall be inserted after Article 28 of the Agreement:

“Article 28A

Assistance in the Collection of Taxes

1. The two States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the two States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article. No request for assistance may be made if the total amount of the relevant claim is less than EUR 1,500.
2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the

States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. The provisions of this Article shall apply only to a revenue claim that forms the subject of an instrument permitting enforcement in the applicant State and, unless otherwise agreed between the competent authorities, that is not contested. However, where the claim relates to a liability to tax of a person as a non-resident of the applicant State, this Article shall only apply, unless otherwise agreed between the competent authorities, where the claim may no longer be contested. The revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.
4. When a revenue claim of a State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such and, unless otherwise agreed between the competent authorities, cannot be collected by imprisonment for debt of the debtor. In addition, a revenue claim accepted by a State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in

that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other State.
7. Where, at any time after a request has been made by a State under paragraph 3 or 4 and before the other State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be:
 - a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
 - b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.
8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other State;
 - b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
 - c) to provide assistance if the other State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

- d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other State.”

Article 6

The following Article shall be inserted before Article I of the Protocol to the Agreement:

“General

Subject to any reservations, observations or positions as the case may be to the OECD Model Tax Convention or its Commentary made by either State, the two States shall interpret the provisions of the Agreement which are identical or in substance similar to the provisions of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, in accordance with the OECD Commentary thereon at the moment of signing the Agreement and any subsequent clarifying modifications of such Commentary. Especially, the two States shall interpret the term 'beneficial owner' used in the Agreement in accordance with the interpretation thereof as published by the OECD at the moment of signing the Agreement and any subsequent clarifying modifications of such OECD interpretation.”.

Article 7

The following Article shall be inserted after Article X of the Protocol to the Agreement:

“XI With reference to Article 28

The provisions of Article 28 shall also apply accordingly to information that is foreseeable relevant for carrying out income-related regulations if the Netherlands tax administration is in charge of implementing and enforcing such income-related regulations. Information received under this Protocol shall be

used only for the purpose of levying the contributions, granting the benefits or determining the extent of these contributions and benefits derived from income-related regulations.”.

Article 8

Article VIII of the Protocol to the Agreement shall be replaced by;

- “1. Where tax has been levied at source in excess of the amount of tax chargeable under the provisions of Articles 10, 11 and 12, applications for the refund of the excess amount of tax have to be lodged with the competent authority of the State having levied the tax, within a period of three years after the expiration of the calendar year in which the tax has been levied.
2. It is understood that no mutual agreement on the mode of application of Articles 10, 11 and 12, is required for the application of these Articles.”.

Article 9

This Protocol shall form an integral part of the Agreement, and its Protocol.

Article 10

Each State shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. It shall enter into force on the first day of the second month following the later of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing through diplomatic channels. The provisions of this Protocol shall for the first time have effect for amounts paid or credited on or after the first day of the second month next following the date on which the Protocol enters into force.

IN WITNESS whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE at ... Jakarta this thirtieth day of
..... July 2015, in duplicate, in the Indonesian, Netherlands,
and English languages, the three texts being equally authentic. In the event of
there being a divergence in the interpretation and the application of this
Protocol, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS

Signed

Signed

SUAHASIL NAZARA
HEAD OF FISCAL POLICY AGENCY
MINISTRY OF FINANCE

ROB SWARTBOL
AMBASSADOR EXTRAORDINARY
AND PLENIPOTENTIARY



REPUBLIK INDONESIA

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET VERDRAG
TUSSEN
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIA
EN

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN HET VOORKOMEN
VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING MET BETREKKING TOT
BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN, EN HET PROTOCOL DAARBIJ,
ONDERTEKEND TE JAKARTA OP 29 JANUARI 2002

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIA EN DE REGERING VAN
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

Geleid door de wens een Protocol te sluiten tot wijziging van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, en het Protocol daarbij, ondertekend te Jakarta op 29 Januari 2002 (hierna te noemen "het Verdrag"),

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Artikel 10, tweede lid, van het Verdrag wordt vervangen door het volgende artikellid:

- "2. Deze dividenden mogen echter ook in de Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden een inwoner van de andere Staat is, mag de aldus geheven belasting.
- a) 5 percent van het brutobedrag van de dividenden niet overschrijden, indien de uiteindelijk gerechtigde een lichaam is (niet zijnde een samenwerkingsverband) dat onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt;
 - b) 10 percent van het brutobedrag van de dividenden niet overschrijden, indien de uiteindelijk gerechtigde een pensioenfonds is dat ingevolge de wettelijke bepalingen van een van beide Staten erkend is en onder toezicht staat en waarvan het inkomen in het algemeen is vrijgesteld van belasting in de Staat waarin het ingevolge de wettelijke bepalingen is erkend en onder toezicht staat;
 - c) in alle overige gevallen 15 percent van het brutobedrag van de dividenden niet overschrijden."

Artikel 2

Artikel 11, vierde lid, van het Verdrag wordt vervangen door het volgende artikellid:

- "4. Niettegenstaande de bepalingen van het tweede lid, mag interest afkomstig uit een van beide Staten ook in de Staat waaruit hij afkomstig is overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar indien de uiteindelijk gerechtigde tot de interest een inwoner van de andere Staat is en de interest wordt betaald ter zake van een lening met een looptijd van meer dan twee jaar of wordt betaald in verband met de verkoop op afbetaling van nijverheids- of handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, mag de aldus geheven belasting 5 percent van het brutobedrag van de interest niet overschrijden."

Artikel 3

- a) In artikel 24, derde lid, van het Verdrag worden de woorden "artikel 16, eerste lid," vervangen door de woorden: "artikel 16, eerste en derde lid,";
- b) In artikel 24, vierde lid, van het Verdrag worden de woorden "artikel 11, tweede lid," vervangen door de woorden: "artikel 11, tweede en vierde lid,";

Artikel 4

Artikel 28 wordt in zijn geheel vervangen door het volgende artikel:

"Artikel 28

Uitwisseling Van Informatie

1. De bevoegde autoriteiten van de beide Staten wisselen informatie uit die naar verwachting van belang is voor de uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag of voor de administratie of de tenuitvoerlegging van de nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort en benaming die worden geheven ten behoeve van beide Staten, of van de staatkundige onderdelen of plaatselijke publiekrechtelijke lichamen daarvan, voor zover de heffing van die belastingen niet in strijd is met het Verdrag. De uitwisseling van informatie wordt niet beperkt door de artikelen 1 en 2.
2. Alle uit hoofde van het eerste lid door een van beide Staten ontvangen informatie wordt op dezelfde wijze geheim gehouden als informatie die volgens de nationale wetgeving van die Staat is verkregen en wordt alleen ter kennis gebracht van personen of autoriteiten (daaronder begrepen rechterlijke instanties en administratiefrechtelijke lichamen) die betrokken zijn bij de vaststelling of invordering van, de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van, of de beslissing in beroepszaken betrekking hebbende op de

in het eerste lid bedoelde belastingen, of het toezicht daarop. Deze personen of autoriteiten mogen van de informatie alleen voor deze doeleinden gebruikmaken. Zij mogen de informatie bekendmaken in openbare rechtszittingen of in gerechtelijke beslissingen.

3. In geen geval worden de bepalingen van de voorgaande leden zo uitgelegd dat zij een Staat de verplichting opleggen:
 - a) administratieve maatregelen te nemen die in strijd zijn met de wetgeving of de administratieve praktijk van die of van de andere Staat;
 - b) informatie te verstrekken die niet verkrijgbaar is volgens de wetgeving of in de normale administratieve gang van zaken van die of van de andere Staat;
 - c) informatie te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze zou onthullen, dan wel informatie waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde (ordre public).
4. Indien informatie wordt verzocht door een van beide Staten in overeenstemming met dit artikel, wendt de andere Staat zijn maatregelen inzake het verzamelen van informatie aan om de verlangde informatie te verkrijgen, ongeacht het feit dat die andere Staat ten behoeve van zijn eigen belastingheffing niet over dergelijke informatie behoeft te beschikken. Op de in de vorige zin vervatte verplichting zijn de beperkingen van het derde lid van toepassing, maar deze beperkingen mogen in geen geval zodanig worden uitgelegd dat het een Staat is toegestaan uitsluitend op grond van het feit dat hij geen nationaal belang heeft bij dergelijke informatie te weigeren informatie te verstrekken.
5. De bepalingen van het derde lid mogen in geen geval zodanig worden uitgelegd dat het een Staat is toegestaan het verschaffen van informatie te weigeren uitsluitend op grond van het feit dat de betreffende gegevens berusten bij een bank, een andere financiële instelling, een gevolmachtigde, of een persoon die bij wijze van vertegenwoordiging of als

vertrouwenspersoon optreedt, dan wel omdat deze betrekking hebben op eigendomsbelangen in een persoon.”

Artikel 5

Het volgende artikel wordt na artikel 28 van het Verdrag ingevoegd:

“Artikel 28A

Bijstand bij de Invordering van Belastingen

1. De Staten verlenen elkaar bijstand bij de invordering van belastingvorderingen. Deze bijstand wordt niet beperkt door de artikelen 1 en 2. De bevoegde autoriteiten van de Staten kunnen in onderlinge overeenstemming de wijze van toepassing van dit artikel regelen. Er mag geen verzoek om bijstand worden ingediend indien het totale bedrag van de betreffende vordering minder is dan EUR 1.500.
2. Onder de uitdrukking “belastingvordering” als gebezigd in dit artikel wordt verstaan een bedrag verschuldigd in verband met belastingen van elke soort en benaming die worden geheven ten behoeve van de Staten, voor zover de belastingheffing uit hoofde daarvan niet in strijd is met dit Verdrag of met een ander instrument waarbij de Staten partij zijn, alsmede interest, administratieve boetes en de kosten van invordering of van conservatoire maatregelen die verband houden met dat bedrag.
3. De bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing op een belastingvordering die onderwerp is van een executoriale titel in de verzoekende Staat en die, tenzij anders overeengekomen tussen de bevoegde autoriteiten, niet wordt bestreden. Indien de vordering echter een belastingverplichting betreft van een persoon die geen inwoner van de verzoekende Staat is, is dit artikel slechts van toepassing indien de vordering niet langer kan worden bestreden, tenzij anders overeengekomen tussen de bevoegde autoriteiten. De belastingvordering wordt door die

andere Staat ingevorderd in overeenstemming met de bepalingen van zijn wetgeving die van toepassing zijn op de tenuitvoerlegging en invordering van zijn eigen belastingen als ware de belastingvordering een belastingvordering van die andere Staat.

4. Indien een belastingvordering van een Staat een vordering is ter zake waarvan die Staat uit hoofde van zijn wetgeving conservatoire maatregelen kan nemen teneinde de invordering te waarborgen, kan die belastingvordering op verzoek van de bevoegde autoriteit van die Staat worden aanvaard ten behoeve van het nemen van conservatoire maatregelen door de bevoegde autoriteit van die andere Staat. Die andere Staat neemt ter zake van die belastingvordering conservatoire maatregelen in overeenstemming met de bepalingen van zijn wetgeving, als ware de belastingvordering een belastingvordering van die andere Staat, ook wanneer de belastingvordering op het tijdstip waarop deze maatregelen worden genomen niet invorderbaar is in de eerstbedoelde Staat of verschuldigd is door een persoon die gerechtigd is de invordering ervan te beletten.
5. Onverminderd de bepalingen van het derde en vierde lid, zijn op een door een Staat voor de toepassing van het derde of vierde lid aanvaarde belastingvordering niet de termijnen van toepassing noch wordt aan een belastingvordering voorrang verleend uit hoofde van de wetgeving van die Staat op grond van haar aard als zodanig en, tenzij anders overeengekomen tussen de bevoegde autoriteiten, kunnen belastingvorderingen niet worden ingevorderd door middel van inhechtenisneming wegens schuld van de schuldenaar. Voorts wordt aan een door een Staat voor de toepassing van het derde of vierde lid aanvaarde belastingvordering in die Staat geen voorrang verleend, die uit hoofde van de wetgeving van de andere Staat op die belastingvordering van toepassing is.
6. Procedures inzake het bestaan, de geldigheid of het bedrag van een belastingvordering van een Staat worden niet aanhangig gemaakt bij de

rechterlijke instanties of administratiefrechtelijke lichamen van de andere Staat.

7. Indien te eniger tijd nadat uit hoofde van het derde of vierde lid een verzoek is gedaan door een Staat en voordat de andere Staat de desbetreffende belastingvordering heeft ingevorderd en overgemaakt aan de eerstbedoelde Staat, de desbetreffende belastingvordering:
 - a) in het geval van een verzoek ingevolge het derde lid, ophoudt een belastingvordering van de eerstbedoelde Staat te zijn die invorderbaar is uit hoofde van de wetgeving van die Staat en die verschuldigd is door een persoon die, op dat tijdstip, uit hoofde van de wetgeving van die Staat de invordering ervan niet kan beletten; of
 - b) in het geval van een verzoek uit hoofde van het vierde lid, ophoudt een belastingvordering van de eerstbedoelde Staat te zijn ter zake waarvan die Staat uit hoofde van zijn wetgeving conservatoire maatregelen kan treffen teneinde de invordering ervan te waarborgen,
stelt de bevoegde autoriteit van de eerstbedoelde Staat de bevoegde autoriteit van de andere Staat onverwijld daarvan in kennis, en, naar keuze van de andere Staat, wordt het verzoek door de eerstbedoelde Staat uitgesteld of ingetrokken.

8. In geen geval worden de bepalingen van dit artikel zo uitgelegd dat zij een Staat de verplichting opleggen:
 - a) administratieve maatregelen te nemen die in strijd zijn met de wetgeving of de administratieve praktijk van die of van de andere Staat;
 - b) maatregelen te nemen die in strijd zouden zijn met de openbare orde (ordre public);
 - c) bijstand te verlenen indien de andere Staat niet alle redelijke invorderings- of conservatoire maatregelen heeft aangewend die hem naargelang van het geval uit hoofde van zijn wetgeving of bestuurlijke praktijk, ter beschikking staan;
 - d) bijstand te verlenen in gevallen waarin de administratieve last voor die Staat kennelijk niet in verhouding staat tot het voordeel te behalen door de andere Staat."

Artikel 6

Het volgende artikel wordt voor artikel I van het Protocol bij het Verdrag ingevoegd:

“Algemeen

Met inachtneming van mogelijke voorbehouden, opmerkingen of standpunten, naargelang van het geval, bij of ten aanzien van het OESO model belastingverdrag of het commentaar daarbij van een van de twee Staten, leggen de beide Staten de bepalingen van het Verdrag die gelijk zijn of in hoofdzaak gelijk zijn aan de bepalingen van het OESO-model belastingverdrag inzake dubbele belasting naar het inkomen en naar het vermogen uit overeenkomstig het commentaar van de OESO op deze bepalingen op het tijdstip van ondertekening van het Verdrag en overeenkomstig latere wijzigingen ter verduidelijking van dit commentaar van de OESO. De beide Staten leggen met name het in het Verdrag gebezigde begrip “uiteindelijk gerechtigde” uit overeenkomstig de uitlegging daarvan die door de OESO is gepubliceerd op het tijdstip van ondertekening van het Verdrag en overeenkomstig latere wijzigingen ter verduidelijking van een dergelijke uitlegging door de OESO.”

Artikel 7

Het volgende artikel wordt na artikel X van het Protocol bij het Verdrag ingevoegd:

“XI Ad artikel 28:

De bepalingen van artikel 28 zijn dienovereenkomstig van toepassing op inlichtingen die naar verwachting van belang zijn voor de tenuitvoerlegging van inkomensafhankelijke regelingen indien de Nederlandse belastingadministratie verantwoordelijk is voor de uitvoering en naleving van dergelijke inkomensafhankelijke regelingen. Inlichtingen die uit hoofde van dit Protocol worden verkregen worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het innen van

bijdragen, toekennen van voordelen of vaststellen van de omvang van deze bijdragen en voordelen die voortvloeien uit inkomensafhankelijke regelingen.

Artikel 8

Artikel VIII van het Protocol bij het Verdrag wordt vervangen door:

- "1. Indien aan de bron belasting is geheven die het belastingbedrag dat ingevolge de bepalingen van de artikelen 10, 11 en 12 mag worden geheven te boven gaat, moeten verzoeken om teruggaaf van het daarboven uitgaande belastingbedrag worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de Staat die de belasting heeft geheven, binnen een tijdvak van drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.
2. Het is wel te verstaan dat er geen onderlinge overeenstemming over de wijze van toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 vereist is voor de toepassing van deze artikelen."

Artikel 9

Dit Protocol vormt een integrerend onderdeel van het Verdrag en het Protocol daarbij.

Artikel 10

Elke Staat stelt de andere in kennis van de voltooiing van de op grond van zijn wetgeving vereiste procedures voor het in werking doen treden van dit Protocol. Het Protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de laatste datum waarop de onderscheiden Regeringen elkaar schriftelijk langs diplomatieke weg in kennis hebben gesteld. De bepalingen van dit Protocol zijn voor het eerst van toepassing op bedragen betaald of betaalbaar

gesteld op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop het Protocol in werking treedt.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Protocol hebben ondertekend.

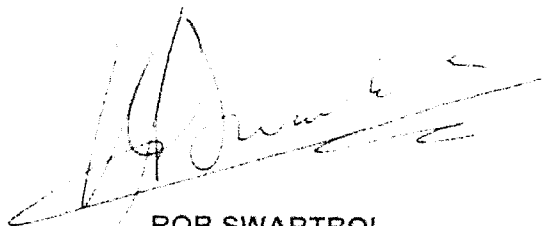
GEDAAN te op
....., in tweevoud de Nederlandse, de Indonesische en de Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie en toepassing van dit Protocol is de Engelse tekst doorslaggevend.

VOOR DE REGERING VAN DE
REPUBLIEK INDONESIË

VOOR DE REGERING VAN HET
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN



SUAHASIL NAZARA
HOOFD VAN FISCAAL BELEID



ROB SWARTBOL
BUITENGEWOON EN
GEVOLMACHTIGD AMBASSADEUR